

# POLITIK PEMBERITAAN MEDIA MASSA: KONSTRUKSI MEDIA MASSA PADA ISU-ISU KONTROVERSIAL

Oleh: Karman\*

## *Abstract*

*Mass Media -with a variety of information presented - is the result of the construction process. This means that it become the arena of the social realities News (or representations of reality) can be seen in structure of sentence and language aspects. Aspect of language make up an aspect of ideology. The mass media also play an active role in news-making politics. The mass media do it to get reader's support and affect the reader to be consistent with the idea introduced by media. News-making politic is seen clearly on controversial cases, full of ideological-political conflict and culture as well (including the issue of faith). This article will explain how the news-making politic played by media in controversial cases. Issues that will be used as examples in this article are controversial issues on Ambalat blocks, pornografi and pornoaction act draft and collective decree of three minister regarding Jamaah Ahmadiyah Indonesia.*

*Keywords: constructivism, ideology, mass media*

## **Abstrak**

*Media massa dengan berbagai informasi yang dipresentasikan merupakan hasil dari proses konstruksi. Ini berarti ia menjadi arena presentasi berbagai realitas sosial. Representasi atau pemberitaan realitas terlihat pada struktur kalimat dan aspek-aspek bahasa. Aspek bahasa merupakan aspek ideologi. Media massa juga memainkan peran aktif dalam politik pemberitaan. Media massa melakukan politik pemberitaan untuk mendapatkan dukungan pembaca dan mempengaruhi pembaca agar seiring dengan ide. Politik pemberitaan akan terlihat jelas pada kasus-kasus yang kontroversial, penuh pergulatan ideologis-politik dan budaya (termasuk dalam masalah bernuansa agama). Artikel ini akan memaparkan bagaimana politik pemberitaan media massa bermain pada kasus-kasus yang kontroversial. Isu yang akan dijadikan contoh pada artikel ini adalah isu sengketa blok Ambalat, rencana pengesahan RUU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi), dan rencana penerbitan SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia.*

*Kata kunci: konstruktivisme, ideologi, media massa*

## **1. Pendahuluan**

Media sebagai entitas aktif yang hidup, eksis di tengah dinamika realitas kehidupan, tidak bisa melepaskan diri untuk tidak berperan aktif, turut serta berkecimpung dalam dinamika kehidupan tadi. Wujud nyata yang dilakukan oleh media massa adalah melakukan politik. Politik yang dimaksud bukanlah politik dalam artian sempit berupa kontestasi dalam ajang pesta demokrasi tapi dalam bentuk pemberitaan.

Berbagai informasi yang berisi fakta dan opini termasuk acara-hiburan dan iklan dari berbagai sumber baik melalui aktifitas pencarian oleh media maupun melalui aktifitas aktif dari sumber terhadap media merupakan proses konstruksi. Dengan demikian media telah menjadi

arena untuk merepresentasikan berbagai realitas menurut konstruksi media atau konstruksi berbagai sumber itu sendiri. Representasi dari realitas melalui struktur kalimat dan aspek-aspek bahasa merupakan aspek ideologi dari ranah bahasa. Artinya ungkapan dalam bahasa akan menunjukkan pada ideologi tertentu. Dalam media kemungkinan ditemukan ideologi yang berbeda atau tidak ada kaitannya dengan ideologi media. Sumber informasi menyampaikan berbagai peristiwa dan fakta dengan melakukan konstruksi melalui bahasa. Awak media juga mengonstruksi bahan informasinya untuk disampaikan kepada publik.

Pemberitaan dikatakan sebagai sebuah politik karena perannya pun memiliki kemiripan

dengan politik yang mencari dukungan (*voter*). Media massa melakukan politik pemberitaan untuk mendapatkan, mempengaruhi pembaca agar seiring dengan ide, wacana yang digulirkan. Politik pemberitaan akan sangat terlihat jelas pada kasus-kasus yang menarik, serta kontroversi, serta isu-isu yang sarat dengan kepentingan baik politik, ideologis maupun kultural termasuk isu-isu agama. Sikap media yang berbeda satu dengan lain menunjukkan bahwa media pun tengah memperjuangkan ideologinya, *vested interest*-nya. Ideologi media massa akan sangat jelas khususnya pada kejadian, peristiwa yang kontroversial, seperti isu kenaikan BBM, isu demonstrasi penolakan BBM, pelarangan rok mini dan pembentukan satgas antipornografi. Dalam tulisan ini, akan ditunjukkan bahwa media massa berperan aktif dalam politik pemberitaan terkait masalah-masalah yang kontroversial.

Masalah kontroversial yang akan diangkat adalah masalah sosial berbau keagamaan misalnya rencana penerbitan SKB Tiga Menteri dan rencana pengesahan RUU APP. Kedua kasus tersebut sudah berlalu. Produk hukumnya pun sudah terbit. Namun, kedua masalah itu penting untuk dijadikan contoh yang baik terkait peran media sebagai aktor dalam jagat politik pemberitaan. Selain itu, masalah Ahmadiyah hingga sekarang masih terus tak kunjung selesai, termasuk juga pengaturan pornografi. Masalah kontroversial lain yang dijadikan contoh pada tulisan adalah masalah sengketa blok Ambalat.

## 2. Pembahasan

Secara teoritis dan filosofis, media bisa merepresentasikan berbagai ideologi baik karena dimensi yang bersumber dari ketidaksadaran media maupun ketidaksadaran sumber informasi media maupun karena dimensi bahasa. Ideologi yang ada dalam media bisa merupakan proses reproduksi dari ideologi yang ada dan bisa juga merupakan sebuah pertarungan ideologi kepentingan baik politik, ekonomi maupun kultural. Menurut O'Shaughnessy dan Jane Stadler (2005:196), ideologi bisa ditemukan di tiga tempat, salah satunya adalah dalam bahasa. Hal ini sering dilakukan dalam kajian media berkaitan dengan makna ideologis yang ada dalam isi media.

Dalam konteks kajian ini, ideologi media ada pada bahasa, teks dan representasi yang diungkapkan dalam pemberitaan media massa. Secara umum, teks-teks ideologi dalam media bisa digali dari keseluruhan isi media dan bisa juga

pada *genre* tertentu dalam media, seperti *genre* berita, feature, drama, karikatur, foto. Masing-masing *genre* memiliki karakter masing-masing yang mempunyai implikasi masing-masing dalam memilih perspektif dan metode yang digunakan. Perspektif yang akan diuraikan pada tulisan ini adalah perspektif konstruktivisme. Coroty (1998: 42-43) mengatakan perspektif konstruktivisme (dan juga konstruksionisme) pada dasarnya menganggap realitas yang disajikan media merupakan hasil konstruksi baik personal (*constructivism*) dan secara sosial (*costructionism*). Pada tingkatan metode menggali ideologi dapat digunakan analisis teks, salah satunya adalah *framing*.

Jika dilihat dengan menggunakan paradigma-paradigma teori yang diperkenalkan oleh Littlejohn, konstruktivisme tergolong *genre interpretative*. *Genre* ini menjelaskan proses dimana pemahaman (*understanding*) terjadi dan membuat perbedaan yang jelas antara *understanding* dengan penjelasan ilmiah (*scientific explanation*). Tujuan interpretasi bukan menemukan hukum-hukum yang mengatur kejadian-kejadian, tetapi mengungkap cara-cara orang dalam memahami pengalaman mereka sendiri. Teori-teori interpretif menekankan bahasa sebagai pusat pengalaman, meyakini bahasa akan menciptakan dunia. (Rahardjo, 2009).

Dalam kaitannya dengan *framing*, Robert N. Entman mengatakan bahwa *framing* adalah *to select some aspect of a perceived reality and make them more salient in a communicating text in such a way as to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation and/ or treatment recommendation for item described* (memilih beberapa aspek realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi dengan cara agar mempromosikan definisi masalah tertentu, penafsiran sebab akibat, evaluasi moral, dan atau rekomendasi perlakuan untuk item yang digambarkan (Entman, 1993: 52). Jadi, Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas.

Kata penonjolan (*salience*) perlu didefinisikan sebagai membuat informasi lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan/ mudah diingat. Peningkatan dalam penonjolan mempertinggi probabilitas bahwa penerima menerima informasi, memahaminya dengan seksama lalu memprosesnya serta menyimpannya dalam ingatan (Entman, 1993: 53).

Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok sudah barang tentu memiliki peluang besar untuk diperhatikan dan mempenagruhi khalayak dalam memahami realitas. Karena itu dalam prakteknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lainnya, serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana seperti penempatan yang mencolok (menempatkan berita pada *headline*, halaman depan atau halaman belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memeperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan peristiwa tertentu. Penonjolan yang dilakukan oleh media terhadap suatu berita tertentu bukanlah dianggap atau dimaknai sebagai bisa tetapi secara ideologi sebagai starategi wacana yakni sebuah upaya menyuguhkan pada publik tentang pandangan tertentu agar pandangannya lebih diterima.

Analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis *framing* mencermati cara-cara media melakukan seleksi penonjolan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih berarti atau diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektif media. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta tidak hendak dibawa kemana berita tersebut (Fauzi, 2003: 23). Analisis *framing* tidak melihat presentasi media sebagai sesuatu yang bebas nilai. Akan selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang dikemukakan oleh Pan & Kosicki (Pan & Kosicki, 1993: 58): "... it accepts both assumptions of the rule governed nature of the text formation and the multidimensional conception of the news text that will allow for cognitive shortcuts in both news production and consumption". Pada uraian berikut ini, penulis akan menggambarkan bagaimana *framing* atau politik pemberitaan media massa mainstreaan di negeri ini berperan aktif mempersuasi, menggiring khalayak pembaca agar sesuai dengan isu yang ditonjolkannya yang tentu saja sarat dengan unsur ideologis.

Isu yang menghangat di Indonesia yang menarik diskusi publik adalah masalah sengketa blok Ambalat. Sengketa antara Indonesia dan

Malaysia terkait status kepemilikan Ambalat (selanjutnya disebut *Sengketa Ambalat*) menjadi isu yang banyak dibicarakan selama bulan Maret 2005. Ambalat menjadi bahan pemberitaan berbagai media massa di Indonesia. *Kompas* dan *Republika* adalah dua media nasional yang memberikan perhatian serius terhadap sengketa ini. Untuk itu patut disimak hasil penelitian Mubarak terkait masalah itu. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisis *framing*.

Hasil penelitian itu ditemukan adanya tema-tema yang mendominasi isi berita selama sengketa blok Ambalat yang berbeda di antara kedua media tersebut. Tema-tema isu yang dominan menurut penelitian Mubarak ini adalah:

- (1). Sikap yang harus diambil pemerintah dalam sengketa Ambalat,
- (2). Cara Penyelesaian sengketa Ambalat
- (3). Kepemilikan Ambalat
- (4). Pembentukan Front Ganyang Malaysia
- (5). Tindakan menggelar kekuatan militer di Ambalat.

Sikap yang harus diambil pemerintah dalam sengketa Ambalat menurut kedua media tersebut berbeda. *Kompas* meminta pemerintah mengambil sikap tegas agar Malaysia tidak melecehkan bangsa Indonesia. Tindakan Malaysia mengklaim wilayah Ambalat adalah perbuatan yang sangat melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu *Kompas* meminta pemerintah untuk tidak ragu mengambil sikap tegas. Tindakan Malaysia mengklaim wilayah Ambalat sebagai bagian wilayahnya juga menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan Indonesia. Karena itu sudah sewajarnya jika pemerintah mengambil sikap tegas guna melindungi keutuhan Indonesia. Guna mendukung pendapat ini, *Kompas* memuat opini berjudul "Indonesia? "I don't care" tulisan Kartono Muhammad yang dimuat pada tanggal 12 Maret 2005. Judul opini tersebut seolah menggambarkan bahwa Malaysia benar-benar tidak peduli dengan Indonesia sehingga mereka dengan seenaknya mengklaim kepemilikan Ambalat. Meskipun mendukung sikap tegas terhadap Malaysia, *Kompas* tetap memandang perlunya pendekatan diplomatis dan menghindari konflik bersenjata. Tidak berbeda dengan *Kompas*, harian *Republika* juga memandang perlunya sikap tegas dalam menghadapi Malaysia. Dalam tajuk berjudul "Sikap tegas pada Malaysia" yang dimuat pada tanggal 5 Maret 2005, *Republika* secara eksplisit menyatakan perlunya

sikap tegas. Petikan tajuk yang berbunyi "Tiada kata selain 'bersikap tegas!'" terhadap Malaysia, baik itu di jalur diplomatik maupun di perairan yang diklaim oleh negeri jiran tersebut" secara jelas menunjukkan pendapat *Republika*. Meskipun mendukung sikap tegas tetapi *Republika memandang perlunya mengutamakan semangat keislaman, keserumpunan dan kebertetangaan*. Terkait tema ini harian *Republika* menurunkan enam berita pada bulan Maret 2005.

Cara penyelesaian sengketa Ambalat juga direkomendasikan secara berbeda. Cara penyelesaian sengketa melalui upaya diplomasi menjadi tema yang diusung oleh kedua media selama pemberitaan sengketa Ambalat. *Kompas* maupun *Republika* secara serius meminta kedua negara untuk mengedepankan upaya diplomasi daripada penggunaan kekuatan militer. Selama bulan Maret 2005 *Kompas* menurunkan sepuluh berita terkait tema ini. Keinginan *Kompas* agar sengketa Ambalat diselesaikan melalui jalur diplomasi nampak dalam opini berjudul "Krisis Ambalat Penyelesaian Terbaik Lewat Cara Damai", yang dimuat 13 Maret 2005. Penyelesaian damai adalah jalan terbaik, karena jika menggunakan kekuatan militer maka kedua negara akan mengalami kerugian. Perang tidak akan menyelesaikan masalah dan justru semakin memperburuk keadaan. Setelah negara-negara di Asia Tenggara bersusah payah untuk bersatu melalui wadah ASEAN, sangat disayangkan jika kemudian bertikai. Terbentuknya ASEAN adalah upaya untuk mempersatukan negara-negara serumpun. Dalam pandangan *Kompas* sangat ironi jika sengketa Ambalat menghancurkan persatuan yang telah terbentuk tersebut. Untuk itu, penyelesaian terbaik dalam sengketa Ambalat adalah dengan mengedepankan upaya diplomasi. Konfrontasi terbuka dengan Malaysia akan membuat kondisi Indonesia semakin parah. Dalam kondisi negara yang dipenuhi berbagai krisis, bencana alam dan ancaman disintegrasi di dalam negeri sangat riskan jika Indonesia memutuskan berperang melawan Malaysia. Selain itu, konfrontasi terbuka melawan Malaysia akan memancing keterlibatan negara persemakmuran bekas jajahan Inggris. Sebagai negara anggota persemakmuran, Malaysia secara otomatis akan mendapat bantuan dari negara anggota lainnya jika mendapat serangan militer. Kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan Indonesia karena harus menghadapi kekuatan militer gabungan dari berbagai negara. Karena itu, dalam opini berjudul "Menghadapi Provokasi Malaysia" tulisan I Basis

Susilo yang dimuat di harian *Kompas*, 7 Maret 2005 meminta pemerintah Indonesia tidak terpancing aksi provokasi Malaysia dan lebih mengedepankan upaya diplomasi.

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi juga menjadi pilihan *Republika*. Perundingan untuk menyelesaikan sengketa Ambalat semestinya terjadi secara bilateral dan tidak perlu melibatkan dunia internasional. Dalam *headline* berjudul "Selesaikan Secara bilateral" edisi 7 Maret 2005, *Republika* menggarisbawahi pentingnya perundingan secara bilateral tanpa campur tangan dunia internasional. Keterlibatan dunia internasional dalam sengketa ini justru akan mempersulit posisi Indonesia. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 lalu menunjukkan bahwa Malaysia lebih siap dalam menghadapi forum internasional seperti Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda. Malaysia lebih berpengalaman dalam penyelesaian sengketa di level internasional sehingga jika masalah Ambalat dibawa ke Mahkamah Internasional posisi Indonesia jelas lebih lemah. Guna mendukung upaya penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi, *Republika* memandang perlunya keterlibatan tokoh umat Islam kedua negara. Hal ini wajar mengingat mayoritas penduduk kedua negara memeluk agama Islam, sehingga semangat keislaman adalah modal penting dalam penyelesaian sengketa ini. Dalam *headline* berjudul "Empat Ulama Indonesia Temui A Badawi" yang dimuat pada tanggal 14 Maret 2005 *Republika* menegaskan hal tersebut. Pendapat *Republika* ini jelas berbeda dengan *Kompas* yang sama sekali tidak menyinggung peran tokoh Islam dan perlunya semangat keislaman dalam kerangka diplomasi. Selama bulan Maret 2005 *Republika* menurunkan delapan belas berita terkait upaya penyelesaian sengketa Ambalat melalui jalur damai.

Terkait status kepemilikan Ambalat kedua media sepakat bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah Indonesia. Untuk mendukung pendapat tersebut *Kompas* menurunkan sembilan berita, sedangkan *Republika* enam berita. Kedua media merujuk pada sumber berita yang sama yaitu Departemen Luar Negeri dan Kementrian ESDM yang secara jelas menyatakan kawasan Ambalat adalah bagian dari wilayah Indonesia. Ambalat merupakan kelanjutan alamiah pantai Kalimantan Timur dan bukan kelanjutan Sabah ke selatan sebagaimana diklaim Malaysia. Dengan demikian, klaim Indonesia atas Ambalat lebih kuat dan

didukung oleh hukum internasional yang mengartikan landas kontinen sebagai kelanjutan alamiah dari wilayah darat dan menjadi wewenang negara pantai. Sedikit berbeda dengan *Kompas*, *Republika* berpendapat bahwa perundingan kedua negara juga perlu membahas tiga area perbatasan lainnya selain status kepemilikan Ambalat agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Ketiga area perbatasan tersebut meliputi garis batas wilayah teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan perairan Sulawesi.

Terkait maraknya pembentukan front Ganyang Malaysia di berbagai daerah, *Kompas* dan *Republika* memiliki perbedaan pandangan. Dalam pandangan *Kompas* hal tersebut wajar sebagai ekspresi kecintaan rakyat terhadap tanah airnya. Meski demikian harus tetap dilandasi pemikiran rasional dengan kepala dingin dan menjauhi tindakan anarkis. Opini *Kompas* pada tanggal 12 Maret 2005 yang berjudul "Pesan Buat Syed Hamid Albar" tulisan Laode M Syarief, berisi pesan agar Malaysia tidak seenaknya mengklaim Blok Ambalat sebagai bagian wilayahnya. Tindakan Malaysia yang mengklaim wilayah Ambalat akan memicu kemarahan rakyat Indonesia. *Harian Republika* menganggap hal tersebut sebagai reaksi berlebihan. Rakyat kedua negara semestinya mengedepankan semangat persaudaraan dalam memandang sengketa ini. Pembentukan front Ganyang Malaysia adalah tindakan tidak perlu dan bisa mengganggu upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi. Guna mendukung pandangannya, *Republika* menurunkan opini berjudul "Isu Ambalat di Malaysia" tulisan Adian Husaini yang dimuat pada 10 Maret 2005. Opini tersebut menggambarkan perbedaan sikap rakyat Indonesia dan Malaysia dalam menyikapi sengketa Ambalat. Rakyat Malaysia menanggapi biasa saja sengketa tersebut, berbeda dengan rakyat Indonesia yang begitu marah dengan tindakan Malaysia.

Dalam pandangan *Kompas*, tindakan menggelar kekuatan militer di daerah sengketa adalah sesuatu yang wajar guna menunjukkan eksistensi Indonesia. *Kompas* bahkan memandang perlu penambahan kekuatan militer di daerah perbatasan guna mengimbangi kekuatan Malaysia. Opini *Kompas* pada tanggal 9 Maret 2005 yang berjudul "Sekuritisasi maritim dan wilayah perbatasan" tulisan Wawan Fahrudin menyoroti pentingnya penguatan armada laut TNI agar mampu menjaga keamanan wilayah laut Indonesia. Guna mendukung pendapatnya,

*Kompas* juga mengutip pernyataan anggota Komisi I DPR RI H A Afifudin yang mendesak TNI lebih banyak menempatkan kapal perang di daerah perbatasan. Keberadaan kapal perang tersebut selain untuk patroli, juga menunjukkan bahwa Indonesia siap bertindak tegas dalam menyikapi sengketa ini. *Harian Republika* memandang tindakan menggelar kekuatan militer di daerah perbatasan sebaiknya diikuti dengan upaya menahan diri agar tidak mengarah pada perang terbuka. Terkait tema ini, *Republika* mengingatkan agar keberadaan kekuatan militer tidak dilanjutkan dengan konflik terbuka. Demikian hasil penelitian dari Mubarak.

Kasus yang tidak kalah menarik adalah kasus rencana pengesahan SKB Tiga Menteri terkait JAI Ahmadiyah. Persoalan ini menjadi topik penelitian yang dilakukan Hidayanti dengan menggunakan analisis framing. Media yang dijadikan objek penelitian adalah *Suara Pembaruan* dan *Harian Republika*. Dari pemberitaan yang ditampilkan oleh *Harian Suara Pembaruan* dan *Republika* dapat dilihat tema-tema yang mendominasi isi berita selama kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah adalah

- (1). Persoalan Ahmadiyah Menyangkut Kebebasan Beragama ataukah Penodaan Agama,
- (2). Sikap yang harus diambil pemerintah dalam kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah Persoalan Ahmadiyah Menyangkut Kebebasan Beragama ataukah Penodaan Agama menjadi tema yang diangkat secara besar-besaran oleh kedua media karena tema ini muncul di awal-awal polemik pemberitaan media massa. Di sinilah media gencar-gencarnya memberitakan masalah Ahmadiyah, masalah kebebasan beragama ataukah penodaan agama. Terkait tema ini, *Suara Pembaruan* menurunkan lima berita selama bulan April 2008. Dalam berita berjudul "Ahmadiyah Merasa Dirugikan Pemerintah" yang dimuat pada tanggal 21 April 2008, *Suara Pembaruan* memandang bahwa persoalan Ahmadiyah ini menyangkut persoalan HAM/kebebasan beragama. Ini adalah persoalan besar dan mendasar, yakni perlindungan atas kebebasan agama dan keyakinan, karena itu menyangkut sendi-sendi dasar negara kita. Ahmadiyah itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1920-an bahkan telah mendapatkan pengakuan dari UUD 1945. *Suara Pembaruan* juga menyayangkan bahwa kini muncul kecenderungan yang mengarah pada sikap anti perbedaan. Pandangan yang dikeluarkan lembaga agama tertentu yang

menyesatkan kelompok atau paham tertentu jelas kurang positif dilihat dari usaha membangun etos penghargaan atas perbedaan. Elite agama maupun lembaganya pun tidak boleh memberikan fatwa yang secara sosial-psikologi memancing emosi masyarakat di tingkat akar rumput. Kebiasaan mengeluarkan fatwa tanpa pertimbangan matang, justru menjadi bumerang bagi penegakkan nilai spiritual dan moralitas agama sendiri.

*Republika* justru memandang bahwa persoalan Ahmadiyah ini sebagai bentuk penistaan, pelecehan, penyimpangan, serta penodaan terhadap pokok-pokok ajaran Islam. Dalam berita berjudul “*Ahmadiyah Dinilai Menyimpang*” yang dimuat pada edisi 17 April 2008, *Republika* memandang bahwa keputusan Bakor Pakem yang menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat adalah keputusan yang tepat. Apalagi keputusan itu dibuat dengan dasar yang lebih kokoh. Ahmadiyah sudah diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki diri. Namun nyatanya, itu tidak dilakukan. Ahmadiyah melanggar 12 butir kesepakatan pimpinan JAI dengan pemerintah tentang penjelasan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan Pengurus Besar (PB) JAI diantaranya tentang kenabian dan kitab suci. Dengan kata lain, fakta tentang kesesatan Ahmadiyah sangat jelas dan nyata, di mana mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad (MGA) adalah nabi penutup bukan Nabi Muhammad SAW dan kitab sucinya adalah Tadzkirah bukan Al-Quran. Keyakinan ini menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam yang dianut di Indonesia bahkan dunia dan telah menimbulkan keresahan juga pertentangan di masyarakat. Pandangan *Republika* ini diperkuat dengan mengutip pendapat Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam berita berjudul “*Hindari Kekerasan Pada Ahmadiyah*” dimuat pada edisi 18 April 2008 yang menegaskan bahwa seseorang atau kelompok yang meyakini adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, memang telah di luar akidah Islam.

Sikap yang harus diambil pemerintah dalam kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah. *Suara Pembaruan* adanya pelanggaran konstitusi dan HAM berupa kebebasan beragama. Rencana pengeluaran SKB Ahmadiyah ini justru memicu aksi kekerasan yang berita berjudul “*SKB Tak Selesaikan Masalah*” yang dimuat pada edisi 29 April 2008 dan diperkuat oleh *Suara Pembaruan* dengan mengutip pendapat Ketua Komnas HAM, Idris Kasim yang menyatakan bahwa SKB belum dapat dipastikan menjadi solusi atas kekerasan

yang terjadi terhadap Ahmadiyah. Keberadaan SKB, justru dikhawatirkan bisa meningkatkan aksi kekerasan itu. *Suara Pembaruan* juga meminta pemerintah konsisten menjaga konstitusi dan menjamin seluruh warga negara bebas menjalankan agama dan keyakinannya. *Suara Pembaruan* tetap memandang perlunya dialog yang elegan guna menyelesaikan masalah JAI ini. SKB Ahmadiyah bukan hal utama dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah.

*Republika* justru secara tegas menyatakan pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan SKB Ahmadiyah. Jangan ditunda-tunda lagi. Apa yang dilakukan para pengikut Ahmadiyah jelas merupakan penodaan sekaligus penghinaan terhadap ajaran Islam yang mulia. Pernyataan ini diperkuat *Republika* dengan mengutip pendapat Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ichwa Syam yang mengatakan di negara mayoritas berpenduduk Muslim, Ahmadiyah tak diperkenankan. Sebab, ajarannya bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. *Republika* juga menekankan karena JAI terbukti menyimpang dari ajaran pokok Islam, Bakor Pakem merekomendasi JAI untuk menghentikan kegiatannya. Payung hukumnya adalah SKB yang merupakan amanat UU. Hal ini diperkuat oleh *Republika* dengan mengutip pendapat Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam berita berjudul “*SKB Amanat UU*”, pada edisi 26 April 2008 yang menegaskan bahwa SKB harus segera diterbitkan karena merupakan amanat UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Meskipun mendukung sikap tegas tetapi *Republika* juga memandang perlunya mengutamakan semangat keislaman dengan mengajak warga Ahmadiyah berdialog dan kembali pada ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Al-Hadist atau *ruju' ilal haq*.

Kasus lain yang menimbulkan debat berkepanjangan adalah masalah pengaturan pornografi. Masalah itu menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat baik itu para politisi di Senayan, cendekiawan, budayawan, agamawan juga media massa baik itu majalah, koran dan juga internet. Majalah yang gencar memberitakan masalah ini adalah majalah *Tempo*. Penulis sangat serius mengikuti masalah ini pada level media massa. Bahkan penelitian penulis pun tentang masalah ini. Berikut secara singkat penulis gambarkan bagaimana perdebatan itu terjadi antarmedia.

Dalam dialektika di ranah media massa media massa menggunakan instrumen politik

pemberitaan. Media massa terbelah menjadi dua yang mendukung dan yang menolak. Berikut ditampilkan peran media massa dalam pemberitaan rencana pengesahan RUU APP untuk menggambarkan politik pemberitaannya.

Harian *Kompas* memuat tulisan Siswono Yudhohusodo pada tanggal 29 Maret 2006. Ia menulis dengan judul “Negara dan Keberagaman Budaya”. Wacana dominan di *Kompas* masalah nasionalisme dan keengganan menerima, mengadopsi atau pun mengadaptasi nilai ke-Islaman. Tertulis dalam harian tersebut bahwa sebagai konsekuensi negara kesatuan (unitarian) yang menempatkan seluruh wilayah negara sebagai kesatuan tunggal ruang hidup bangsa, sebuah RUU juga harus di-*drop* bila ada satu saja daerah yang menyatakan menolaknya karena tidak cocok dengan adat istiadat dan budaya setempat. RUU APP sudah ditolak di Bali dan Papua. Wacana dominan yang tersirat pada kutipan berita di atas adalah masalah nasionalisme yang memiliki konsekuensi mengedepankan kepentingan bersama. RUU baru bisa lolos hanya jika disepakati oleh seluruh daerah atau elemen masyarakat. Kesatuan menjadi isu yang ditekankan pada pemberitaan *Kompas*. Bila sebuah *draft* itu lolos tanpa disepakati oleh seluruh elemen bangsa, itu sama halnya dengan melanggar komitmen sebagai bangsa yang berbentuk negara kesatuan. Pada tanggal 12 Juni 2006, harian tersebut juga memuat pernyataan Eros Djarot yang tidak menyetujui pengesahan RUU APP. Eros Djarot mengatakan bahwa yang paling menyedihkan adalah dibiarkan dan dipeliharanya nafsu politik kelompok yang secara sistemik membangun kinerja politik yang bertujuan menciptakan Negara dalam Negara. Pancasila yang tak terpisahkan dari UUD 1945 sebagai batang tubuh yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, seperti tak digubris. Dalam kenyataan telah bermunculan ‘negara-negara kecil’ di berbagai daerah (kabupaten/kota) yang memberlakukan ‘hukum lain’ di luar hukum positif yang berlaku. Nah, apakah Indonesia yang *amburadul* seperti ini yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 kepada pengelola bangsa ini?”. Demikian diberitakan oleh *Kompas*.

Pemberitaan di harian *Pikiran Rakyat* didominasi oleh wacana penolakan RUU APP. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah masalah diskorelasi substansi RUU itu dengan multikulturalisme serta penilaian RUU itu yang menurutnya bersifat misoginis, phalosentristik dan

karena sudah ada regulasi yaitu KUHP yang mengaturnya. Harian terbesar Kota Parahyangan Bandung ini memuat tulisan dengan judul “Perempuan Dan RUU APP” pada edisi 24 Maret 2006. *Pikiran Rakyat* mengutip pernyataan-pernyataan mereka yang menolak RUU APP, yaitu; Jamal D. Rahman (penyair dan Redaktur Pelaksana majalah sastra *Horison*), Ratna Sarumpaet (pemain teater), Ayu Utami (Novelis), Sapardi Djoko Damono yang sudah dikutip pada di bagian sebelumnya. Wacana pemberitaan *Pikiran Rakyat* cenderung menilai RUU APP bersipat misoginis dan mubazir karena sudah ada regulasi yaitu KUHP yang mengaturnya.

Penolakan rencana pengesahan RUU APP juga terjadi pada pemberitaan majalah *Gatra*. Wacana penolakan RUU APP berdasarkan alasan bahwa draft tersebut menjadi sebetuk formalisasi syariat Islam. Pada edisi awal Mei 2006 majalah *Gatra* memuat sinyalemen bahwa RUU APP adalah bagian dari kendaraan ideologis menuju formalisasi syari’at Islam. Ini mengungkapkan adanya keterkaitan antara RUU APP dengan maraknya peraturan daerah-peraturan daerah yang mengatur masalah kesusilaan, pelacuran, dan anti kemaksiatan yang lahir di sejumlah daerah di Indonesia belakangan ini yang kemudian disebut sebagai “Perda bernuansa Syari’at Islam”. Jadi, wacana isu dominan adalah kesatuan hukum dan rasa nasionalisme.

Harian *Republika* pun tak ketinggalan dalam memberitakan kontroversi RUU APP. Wacana yang mendominasi pemberitaannya adalah wacanan dukungan atas rencana pengesahan RUU APP. Harian pada hari Kamis 2 Maret 2006 memuat berita dengan judul “RUU APP Jangan Sampai *Deadlock*”. Judul ini memberi kesan bahwa *Republika* menghendaki agar proses pengesahan RUU APP itu berjalan mulus. Pada tulisan ini, *Republika* mewawancarai tokoh yang jelas-jelas mendukung pengesahan RUU APP menjadi UU, Wahyutama dari Masyarakat Tolak Pornografi (MTP). Harian ini juga mewawancarai dua anggota pansus RUU APP dari Fraksi PAN, partai yang mendukung pengesahan RUU APP, Latifah Iskandar dan Jumanhuri, Baidhori Adnan dari KIP3 (Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi). *Republika* tidak mewawancarai satu pun dari mereka yang menolak RUU APP. Gaya penulisan *Republika* terkesan kuat medeskreditkan pendapat yang menolak RUU APP. Hal ini dapat dilihat dari kutipan pernyataan Wahyutama yang diwawancarai hari Rabu 1 Maret 2006, "Sekalipun

jumlahnya tidak banyak, tapi mereka serius menggalang dukungan. Baik melalui publik figur maupun media massa" Lebih jelas lagi dapat dilihat kutipan wawancara *Republika* dengan Baidhori Adnan dari KIP3. Berikut petikannya: "Seperti orang kalap, mereka juga mencoba membentur-benturkan RUU APP ke dalam wacana pelanggaran HAM, diskriminasi perempuan, sentimen SARA, hingga memunculkan ancaman disintegrasi".

*Republika* secara lugas menyebut mereka yang menolak RUU APP dengan analogi orang kalap. Secara tidak langsung, *Republika* melakukan kekerasan simbolik terhadap para penolak RUU APP, sesuatu yang sering ditemukan dalam pemberitaan media massa, iklan, film dan sebagainya. Temuan bahwa wacana dominan yang menjadi sikap harian *Republika* bersifat mendukung pengesahannya sebenarnya tidak mengejutkan. Hal ini disebabkan karena *Republika* didirikan untuk umat islam. Ini terbukti bahwa pada tiap hari Jumat ada suplemen bernama *Dialog Jum'at*. Suplemen ini yang berisi ulasankeislaman seperti kajian Tasawuf, khasanah, tokoh-tokoh besar Islam Indonesia dan mancanegara, tanya jawab dengan Prof. Quraish Shihab, sampai info halal, diulas lengkap dalam *Dialog Jumat*.

Dukungan terhadap pengesahan RUU APP dari Majalah Islam, Hidayatullah. Melalui situsnya [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com), Hidayatullah menunjukkan sikapnya, mendukung pengesahan RUU APP. Hidayatullah meminggirkan atau memarginalkan wacana yang menolak RUU tersebut. Sikap ini sangat jelas terlihat pada berita yang ditulis oleh Adian Husaini salah satu ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), organisasi massa yang turut mendukung pengesahan RUU APP. Dalam artikel itu, Hidayatullah menggunakan idiom-idiom yang bersifat negatif dan peyoratif terhadap wacana penolakan RUU APP seperti memuja nativitas dan primitivisme. Petikan artikelnya sebagai berikut: "Pornografi adalah musuh umat manusia beradab, sehingga selama ini selalu ada upaya agar manusia yang masih bertelanjang, diberikan pekaian penutup tubuh mereka. Anehnya, sebagian argumentasi penolakan RUU APP justru berorientasi kepada primitivisme". Lebih lanjut ia menulis: "Ada yang berpendapat, jika RUU ini diterapkan maka suku-suku tertentu yang selama ini biasa hidup telanjang akan terkena ancaman pidana. Logika kaum liberal ini sebenarnya carut-marut dan paradoks. Pada satu sisi mereka

mengagungkan progresivitas (dari bahasa Latin: *progredior*, artinya, 'saya maju ke depan' ), tetapi pada sisi lain, mereka justru mundur ke belakang, dengan memuja nativitas dan primitivitas". Wacana dominan pada majalah itu adalah dukungan terhadap rencana pengesahan RUU APP."

Sementara itu sikap majalah *Al Wa'ie* sangat jelas berpihak pada mereka yang setuju pengesahan RUU APP. Ditulis dalam salah satu beritanya sebagai berikut: "...dalam perspektif umat Islam, tentu RUU APP itu harus pro-syariah. Karena itu pula, dalam pernyataan Forum Umat Islam yang dibacakan dan disampaikan kepada Pansus RUU APP pimpinan H. Balkan Kaplale di Ruang Komisi VIII pada hari Kamis 9 Maret 2006, antara lain kami menulis: Bahwa yang berhak membuat hukum dan yang menentukan baik dan buruk adalah Allah SWT; bahwa hendaknya RUU APP hingga diundangkan nanti distandarisasi dengan syariah yang merupakan hukum Allah Swt. untuk seluruh umat manusia, apapun agamanya, sebagai rahmatan lil 'âlamîn! Manakala RUU tersebut tidak sesuai dengan syariah, sudah menjadi kewajiban kami untuk menasihati dan menegur Anda sesuai dengan perintah amar makruf nahi mungkar".

Sikap *Al Wa'ie* sangat jelas merepresentasikan kepentingan umat islam yang selama ini gigih mendukung pengesahan RUU APP. Hukum menurutnya harus distandardisasi berdasarkan syariat Islam sebagai hukum dari Allah. RUU APP sebagai produk hukum harus sesuai dengan hukum Allah, jika tidak, maka menurut *Al Wa'ie* si pembuat hukum itu wajib diingatkan. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ia sebagai media massa berfungsi sebagai corong kepentingannya. *Al Wa'ie* tidak memberikan ruang tempat terjadinya dialektika atau perdebatan. Pemberitaan di majalah ini menunjukkan sebuah usaha untuk memarginalkan wacana para penolak RUU APP. Ia melakukan singularisasi pesan, pesan yang mendukung saja. Wacana mereka yang menolak RUU APP terkesan, setelah membaca beritanya, tidak logis. Jika dibandingkan dengan media massa islam yang lain, *Al-Wa'ie* lah yang paling lugas tidak basa basi dalam mempromosikan syariat islam.

Fenomena serupa juga terjadi pada majalah *Raditya*, majalah *Hindu* terbesar di Bali. Wacana yang mendominasi di majalah itu adalah penolakan RUU APP. Pada edisi April 2006, *Raditya* secara keras dan tajam menentang RUU



Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Sampul depan Raditya dihiasi dengan tulisan-tulisan bernada peringatan: "AWAS TALIBAN DATANG LEWAT RUU PORNO". Majalah ini dibuka dengan tulisan Editorial berjudul "Tolak RUU Porno" yang ditulis oleh Putu Setia, seorang wartawan yang mendirikan majalah tersebut. Putu Setia menguraikan bahwa porno itu ada dalam pikiran, dan bukan pada objeknya. Porno juga tidak sama dengan telanjang. Ia menulis: "Seorang wanita mendandani tubuhnya dengan mulus, dia tidak pernah bermaksud porno, tetapi pikiran lelaki yang melihatnya itu yang porno. Kenapa harus wanita yang dipersalahkan? Turis berbusana amat minim berjemur di Pantai Kuta. Kenapa harus dilarang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya? Orang Bali di pedesaan juga masih mandi di pancuran umum, atau di kali dengan telanjang. Konsentrasinya pada mandi, bukan untuk menarik perhatian orang. Salah para lelaki kalau mau melirik dan lebih salah lagi kalau melontarkan tuduhan: porno. Ketelanjangan ini yang disamakan dengan pornografi oleh penyusun RUU APP. Jelas salah besar, karena porno dan tidaknya tergantung bagaimana posisi pikiran pada saat itu. Kalau pikiran sudah diset ke porno, wanita dibungkus bak pocong pun akan membangkitkan birahi. Kalau busana yang tertutup itu dilepaskan dan wanita itu ternyata kurus, kudisan, panuan, apa itu masih merangsang birahi?".

Putu Setia menambahkan: "*Saya tetap menolak RUU APP ini meskipun sudah direvisi. Penolakan saya dan seluruh masyarakat Bali sudah harga mati. Kembalikan saja draf RUU APP ini kepada anggota Komisi VIII DPR untuk disimpan dengan ucapan terimakasih. Jangan dibahas lagi*".

Fakta di atas menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan, pengemasan, penyajian realitas ke publik media tidaklah berada pada ruang yang hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan. Ideologi di sini bermakna politik penandaan atau pemaknaan. Bagaimana kita bisa melihat peristiwa dengan kacamata dan pandangan tertentu. Sebab dalam proses melihat dan menandakan peristiwa tersebut, kita menggunakan titik melihat tertentu yang menggambarkan bagaimana peristiwa dijelaskan dalam kerangka berfikir tertentu (Eriyanto2002: 131). Media massa hampir selalu berada dalam himpitan dua kepentingan. Kepentingan pertama, bisnis. Kepentingan kedua, idealisme. Di tengah dua kepentingan itu sangat sulit bagi konsumen

pers mengharap sajian media massa yang tidak berpihak. Sajian pers Indonesia pun tidak terlepas dari kapitalisme media di satu sisi, dan euforia publik di sisi lain. Euforia publik dan kapitalisme media itu dibentuk oleh terpaan globalisasi dan hedonisme, yang mengakibatkan kesenjangan komunikasi antara pengelola lembaga media, dengan berbagai pemangku kepentingannya (Novel Ali, *Kompas*, Kamis, 15 April 2010).

Asumsi-asumsi media sebagai wahana untuk mentransfer informasi, perlu dilengkapi dengan pemikiran yang dibangun dengan asumsi bahwa media sebenarnya tidak hanya mentransfer informasi tetapi mengkonstruksinya sesuai dengan kerangka situasi masyarakat yang melingkupi media sebagai sebuah proses dialogisme. Dalam pandangan konstruktivisme media massa mengkonstruksi informasi dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Media dipandang tidak mungkin melakukan peranan yang netral, terisolasi dari berbagai pengaruh terhadap dirinya baik yang bersumber dari internal organisasi media maupun dari luar media. Demikian juga masyarakat ketika menerima informasi tidak sekedar menerima tetapi mengkonstruksinya berdasarkan skemata masyarakat yang mengaksesnya. Sedangkan dalam pandangan kritis, konstruksi yang dilakukan didasarkan pada kepentingan kelas masyarakat dominan untuk melakukan kekuasaan.

### 3. Penutup

Penjelasan di atas bermuara pada sebuah kesimpulan bahwa media tak bisa lepas dari dinamika realitas sosial, lebih-lebih realitas itu merupakan sesuatu yang kontroversial, penuh dengan benturan konflik ideologis. Sikap media terhadap realitas sosial berbentuk politik, politik yang dimaksud bukan politik dalam artian sempit yang lazim diperbincangkan (kontestasi politik, pemilihan gubernur dan sebagainya) tetapi politik pemberitaan. Politik pemberitaan yang dilakukan media terwujud dan berawal dari praktik konstruksi yang dilakukan oleh awak media dari mulai reporter di lapangan hingga meja redaksi. Jadi berita yang kita baca merupakan hasil proses konstruksi media. Narasumber yang dipilih, fakta yang ditonjolkan, kalimat yang terangkai merupakan bentuk konstruksi yang dilakukan media.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jensen, Klaus Bruhn, "News as Ideology: Economic Statistics and Political Ritual in Television Networks News", *Journal Of Communication*, Vol. 37, No. 1, 1987, hlm. 8 dalam Eriyanto. 2002: 131.
- Turnomo Rahardjo, "Cetak Biru Teori Komunikasi dan Studi Komunikasi di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional, Arah Depan Pengembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia, 13 Maret 2009 di Jakarta Indonesia.
- Entmann, Robert M. (1993), "Framing Toward Clarification of A Fractured Paradigm". *Journal of Communication*. 41-53.
- Eriyanto (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS
- Fauzi, Arifatul Choiri (2007). *Kabar-Kabar Kekerasan Dari Bali*. Yogyakarta: LKiS
- Fauzi, Arifatul Fauzi (2003). *Wacana Terorisme dalam Media: Framing Analisis Pemberitaan Harian Kompas dan Republika dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali*. Thesis. Universitas Indonesia.
- Hidayanti K, Lucy (2008). *Analisis Sikap Media dalam Pemberitaan Menyoal Kontroversi Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Mengenai Pelarangan Ajaran Ahmadiyah di Indonesia (Analisis Framing pada Harian Suara Pembaruan dan Republika)*. Skripsi: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Semarang
- Mubarok (2006). *Analisis Sikap Media Dalam Pemberitaan Sengketa Blok Ambalat (Analisis Framing Harian Kompas dan Republika)*. Skripsi: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Semarang
- Karman (2007). *Analisis Wacana Pemberitaan Media Massa Tentang Isyu Pro Kontra Rencana Pengesahan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) Tahun 2006 (Kasus di Majalah Berita Mingguan Tempo)*. Skripsi: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Semarang
- O'Shaughnessy and Jane Stadler (2005). *Media and Society: An Introduction (Second Edition)*. New York: Oxford University
- Corotty, Michael (1998). *The Foundation of Social Research*. St Leonard: Allen & Unwin
- Novel Ali, "Ideologi Media Massa", *Kompas*, Kamis, 15 April 2010.
- \* **Karman, S.Sos.**  
Lulusan S1 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Diponegoro, Semarang. Bekerja di BPPKI Jakarta, Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- email : karmansalim@gmail.com

"Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral dan sosial".

(Thomas Jefferson)